



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan; dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.
- K E M U T U R K A N
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 587 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

 *R. H. Tarmizi Taher*
 Dr. H. TARMIZI TAHER

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
7.	LAMPUNG	35	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Laut	Kab. Ogan Komering Ilir	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Raya Filial Tanjung Laut O K I
		36	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sekayu	Kab. Musi Banyuasin	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bumiayu Filial Sekayu Musi Banyuasin
		37	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Metro	Kab. Lampung Tengah	Madrasah Tsanawiyah Negeri Poncowati Filial Metro
		38	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Raman Utara	Kab. Lampung Tengah	Madrasah Tsanawiyah Negeri Poncowati Filial Raman Utara
		39	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Talang Padang	Kab. Lampung Selatan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Agung Filial Talang Padang
8.	JAWA BARAT	40	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cipeundeuy	Kab. Majalengka	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukaraja Filial Cipeundeuy
		41	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Talaga	Kab. Majalengka	Madrasah Tsanawiyah Negeri Louwi Munding Filial Talaga
		42	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karang Sasbung	Kab. Majalengka	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karang Sasbung Filial Karang Sasbung
		43	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cirebon II	Kab. Cirebon	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cirebon I Filial Cirebon II
		44	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kadugede	Kab. Kuningan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cigugur Filial Kadugede
		45	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Darma	Kab. Kuningan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cigugur Filial Darma
		46	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Subang	Kab. Kuningan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sindangsari Filial Subang





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 363 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 17 (Tujuh Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 24 (Dua Puluh Empat) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

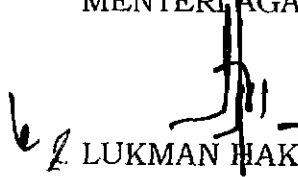
KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ~~369~~ TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 17 (TUJUH BELAS)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MAN 1 (Model) Tanjung Karang	MAN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MAN 2 Tanjung Karang	MAN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MAN 2 Metro	MAN 1 Metro
4	Lampung	MAN Kalianda	MAN 1 Lampung Selatan
5	Lampung	MAN Poncowati	MAN 1 Lampung Tengah
6	Lampung	MAN Kotabumi	MAN 1 Lampung Utara
7	Lampung	MAN Padangratu	MAN 2 Lampung Utara
8	Lampung	MAN Krui	MAN 1 Pesisir Barat
9	Lampung	MAN Liwa	MAN 1 Lampung Barat
10	Lampung	MAN Kotaagung	MAN 1 Tanggamus
11	Lampung	MAN 1 Metro	MAN 1 Lampung Timur
12	Lampung	MAN Banjarnegara	MAN 1 Way Kanan
13	Lampung	MAN Kedondong	MAN 1 Pesawaran
14	Lampung	MAN Pringsewu	MAN 1 Pringsewu
15	Lampung	MAN Mulyakencana	MAN 1 Tulang Bawang Barat
16	Lampung	MAN Kibang Budi Jaya	MAN 2 Tulang Bawang Barat
17	Lampung	MAN Simpang Pematang	MAN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 365 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 24 (DUA PULUH EMPAT)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

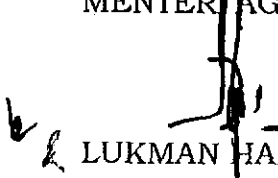
NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MTsN 1 Tanjungkarang	MTsN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MTsN 2 Tanjungkarang	MTsN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MTsN Kalianda	MTsN 1 Lampung Selatan
4	Lampung	MTsN Palas	MTsN 2 Lampung Selatan
5	Lampung	MTsN Sidoharjo	MTsN 3 Lampung Selatan
6	Lampung	MTsN Banjarsari	MTsN 4 Lampung Selatan
7	Lampung	MTsN Poncowati	MTsN 1 Lampung Tengah
8	Lampung	MTsN Bandar Surabaya	MTsN 2 Lampung Tengah
9	Lampung	MTsn 1 Kotabumi	MTsN 1 Lampung Tengah
10	Lampung	MTsn 2 Kotabumi	MTsN 2 Lampung Tengah
11	Lampung	MTsN Padang Ratu	MTsN 3 Lampung Tengah
12	Lampung	MTsN Liwa	MTsN 1 Lampung Barat
13	Lampung	MTsN Menggala	MTsN Tulang Bawang
14	Lampung	MTsN Kotaagung	MTsN 1 Tanggamus
15	Lampung	MTsN Model Talangpadang	MTsN 2 Tanggamus
16	Lampung	MTsN Metro Batanghari	MTsN 1 Lampung Timur
17	Lampung	MTsN Raman Utara	MTsN 2 Lampung Timur
18	Lampung	MTsN Kasui	MTsN 1 Way Kanan
19	Lampung	MTsN Serupa Indah	MTsN 2 Way Kanan
20	Lampung	MTsN Kedondong	MTsN 1 Pesawaran
21	Lampung	MTsN Gunungrejo	MTsN 2 Pesawaran

22. Lampung ...

8

22	Lampung	MTsN Pringsewu	MTsN 1 Pringsewu
23	Lampung	MTsN Sukoharjo	MTsN 2 Pringsewu
24	Lampung	MTsN Seri Tanjung Mesuji	MTsN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 365 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 49 (EMPAT PULUH SEMBILAN)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MIN 1 Tanjung Karang	MIN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MIN 1 Teluk Betung	MIN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MIN Tanjung Agung	MIN 3 Bandar Lampung
4	Lampung	MIN Sawah Brebes	MIN 4 Bandar Lampung
5	Lampung	MIN Sukarame	MIN 5 Bandar Lampung
6	Lampung	MIN Way Halim	MIN 6 Bandar Lampung
7	Lampung	MIN Jagabaya II	MIN 7 Bandar Lampung
8	Lampung	MIN Panjang	MIN 8 Bandar Lampung
9	Lampung	MIN Sukajawa	MIN 9 Bandar Lampung
10	Lampung	MIN Kota Baru	MIN 10 Bandar Lampung
11	Lampung	MIN Sinar Semendo	MIN 11 Bandar Lampung
12	Lampung	MIN Garuntang	MIN 12 Bandar Lampung
13	Lampung	MIN Model Kalianda	MIN 1 Lampung Selatan
14	Lampung	MIN Sukanegara Tanjung Bintang	MIN 2 Lampung Selatan
15	Lampung	MIN Srimulyo Natar	MIN 3 Lampung Selatan
16	Lampung	MIN Sidomulyo	MIN 4 Lampung Selatan
17	Lampung	MIN Rajabasa	MIN 5 Lampung Selatan
18	Lampung	MIN Uhum Sukamaju	MIN 6 Lampung Selatan

19. Lampung ...

4

19	Lampung	MIN 1 Kotabumi	MIN 1 Lampung Utara
20	Lampung	MIN 2 Kotabumi	MIN 2 Lampung Utara
21	Lampung	MIN 3 Kotabumi	MIN 3 Lampung Utara
22	Lampung	MIN 4 Kotabumi	MIN 4 Lampung Utara
23	Lampung	MIN Blambangan Pagar	MIN 5 Lampung Utara
24	Lampung	MIN Padang Ratu	MIN 6 Lampung Utara
25	Lampung	MIN Bernah	MIN 7 Lampung Utara
26	Lampung	MIN 1 Kriu	MIN 1 Pesisir Barat
27	Lampung	MIN 2 Tanjung Raya	MIN 1 Lampung Barat
28	Lampung	MIN 3 Watas	MIN 2 Lampung Barat
29	Lampung	MIN Hujung	MIN 3 Lampung Barat
30	Lampung	MIN Menggala	MIN 1 Tulang Bawang
31	Lampung	MIN Pasar Batang	MIN 2 Tulang Bawang
32	Lampung	MIN Kotaagung	MIN 1 Tanggamus
33	Lampung	MIN Purwodadi	MIN 2 Tanggamus
34	Lampung	MIN Adirejo	MIN 1 Lampung Timur
35	Lampung	MIN Sukadana	MIN 2 Lampung Timur
36	Lampung	MIN Gunung Terang	MIN 3 Lampung Timur
37	Lampung	MIN Braja Sakti	MIN 4 Lampung Timur
38	Lampung	MIN Blambangan Umpu	MIN 1 Way Kanan
39	Lampung	MIN Simpang Asam	MIN 2 Way Kanan
40	Lampung	MIN Tegal Mukti	MIN 3 Way Kanan
41	Lampung	MIN Sritunggal	MIN 4 Way Kanan
42	Lampung	MIN Model Pasar Baru	MIN 1 Pesawaran
43	Lampung	MIN Negara Saka	MIN 2 Pesawaran
44	Lampung	MIN Pringsewu	MIN 1 Pringsewu
45	Lampung	MIN Model Bandungbaru	MIN 2 Pringsewu
46	Lampung	MIN Gumukmas	MIN 3 Pringsewu

47	Lampung	MIN Pamenang	MIN 4 Pringsewu
48	Lampung	MIN Brebes	MIN 1 Tulang Bawang Barat
49	Lampung	MIN Mukti Karya	MIN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

